



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah memiliki kewajiban menyusun LKIP sesuai dengan ketentuan pasal 3 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Sekeratriat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Laporan kinerja ini diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada.

Selama Tahun Anggaran 2021, Sekretariat Daerah melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat membina, mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah meliputi bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan kemasyarakatan serta administrasi umum.

Laporan ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang dilakukan pada Sekretariat Daerah. Informasi yang disampaikan dalam



laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Selain itu LKIP dapat juga dimanfaatkan untuk penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LKIP ini.

Kota Bima, 2 Februari 2022

Sekretaris Daerah
Kota Bima,

Drs. MUKHTAR, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690531 199003 1 004



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2021 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Sekretariat Daerah Kota Bima berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Hasil capaian 9 sasaran strategis, bahwa rata-rata persentase capaian sasaran berhasil, terdiri dari persentase capaian tertinggi ada pada sasaran strategis ke-4, yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik sebesar 103,26% dan persentase capaian terendah adalah sasaran ke- 6, yaitu Meningkatnya Pelaksanaan pembangunan Sesuai aturan sebesar 89,00%. Dari capaian indikator kinerja yang dihasilkan bahwa sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2021 dikategorikan berhasil sebesar 100 %.

Realisasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 67.066.968.352 dari total anggaran sebesar Rp. 68.320.397.234 sehingga Sekretariat Daerah Kota Bima melakukan efisiensi anggaran sebesar 1.253.428.882 atau 1,83 %.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud Dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Sekretaris Daerah Kota Bima	3
1.4 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	6
1.4.1 Sumber Daya Manusia.....	6
1.4.2 Sumber Daya Aset/Modal.....	9
1.5 Aspek Strategis	10
1.6 Landasan Hukum	11
1.7 Permasalahan Yang Sedang Dihadapi	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 Rencana Strategi Tahun 2018-2023	13
2.1.1 Visi.....	14
2.1.2 Misi.....	15
2.1.3 Tujuan Dan Sasaran Sekreariat Daerah.....	15
2.2 Perjanjian Kinerja.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020.....	21
3.1.2 Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2021	22
3.1.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	31
3.2 REALISASI KEUANGAN	31
BAB IV PENUTUP	34
4.1 Kesimpulan.....	34
4.2 Saran	34



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Tujuan Dan Sasaran Sekreariat Daerah	16
Tabel 2. 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Perubahan	17
Tabel 2. 3	Program dan Anggaran Tahun 2021	17
Tabel 3. 1	Skala Nilai Perangkat Kinerja.....	20
Tabel 3. 2.	Rekapitulasi Pencapaian Sasaran Tahun 2021	20
Tabel 3. 3.	Tingkat Pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran dari hasil capaian indikator kinerja Tahun 2021	21
Tabel 3. 4.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota Bima.....	23
Tabel 3. 5	Produk hukum yang diterbitkan.....	28
Tabel 3. 6	Pengadaan Barang dan Jasa 2017-2021	30
Tabel 3. 7	Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2021	32



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1	Jumlah Pegawai Sekretaris Daerah berdasarkan Pendidikan	7
Grafik 1. 2	Jumlah pegawai berdasarkan golongan	8
Grafik 1. 3	Jumalaah Pegawai berdasarkan eselonering	8
Grafik 3. 1	Grafik kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	25
Grafik 3. 2	Nilai SAKIP Kota Bima	26
Grafik 3. 3.	Nilai LPPD Kota Bima 2013-2018	26
Grafik 3. 4	Produk Hukum Daerah yang diterbitkan	28



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas umum penyelenggaraan negara, meliputi : azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas, dan azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2021 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kota Bima dalam kerangka integrasi perwujudan Visi Kota Bima. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang



pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan Tahun sebelumnya. LKIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir Tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2021. LKIP merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP Setda Tahun 2021 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP.



Adapun tujuan penyusunan LKIP Setda Kota Bima Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Bima dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2021 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan kegiatan Setda Kota Bima pada tahun yang akan datang.

1.3 Gambaran Umum Sekretaris Daerah Kota Bima

Sekretariat Daerah dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima dan Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 36 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dengan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:



- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keijakan daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keijakan daerah;
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada pemerintah Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
 - 1) Bagian Pemerintahan
 - a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b. Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c. Subbagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - a. Sub Bagian Subbagian Bina Mental Spiritual
 - b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 - 3) Bagian Hukum
 - a. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan; dan
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - 1) Bagian Perekonomian
 - a. Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b. Sub Bagian Perekonomian; dan
 - c. Sub Bagian Sumber Daya Alam.



2) Bagian Administrasi Pembangunan

- a. Sub Bagian Penyusunan Program.
- b. Sub Bagian Pengendalian Program; dan
- c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

4. Asisten Administrasi Umum

1) Bagian Organisasi

- a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
- c. Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi

2) Bagian Umum

- a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- a. Sub Bagian Protokol;
- b. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan



c. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

1.4 Sumber Daya Perangkat Daerah

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Sekretariat Daerah Kota Bima memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/PNS se Sekretariat Daerah per 31 Desember 2021 sebanyak 129 orang.

Secara keseluruhan, Sekretariat Daerah Kota Bima didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan rincian :

A. Berdasarkan Golongan terdiri dari :

1. Golongan IVd : 1 (satu) orang
2. Golongan IVc : 5 (lima) orang
3. Golongan IVb : 3 (Tiga) orang
4. Golongan IVa : 5 (lima) orang
5. Golongan III : 99 (Sembilan puluh sembilan) orang
6. Golongan II : 15 (lima belas) orang
7. Golongan I : 1 (satu) orang

B. Berdasarkan Jabatan Struktural terdiri dari :

1. Eselon IIa : 1 (satu) orang
2. Eselon IIb : 6 (Enam) orang
3. Eselon III a : 9 (sembilan) orang
4. Eselon IV a : 27 (dua puluh tujuh) orang



5. Staf : 115 (Seratus lima belas) orang

C. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri atas :

1. Strata 3 (S3) : -

2. Strata 2 (S2) : 17 (tujuh belas) orang

3. Strata 1 (S1) : 93 (sembilan puluh tiga) orang

4. Sarjana Muda : 2 (dua) orang

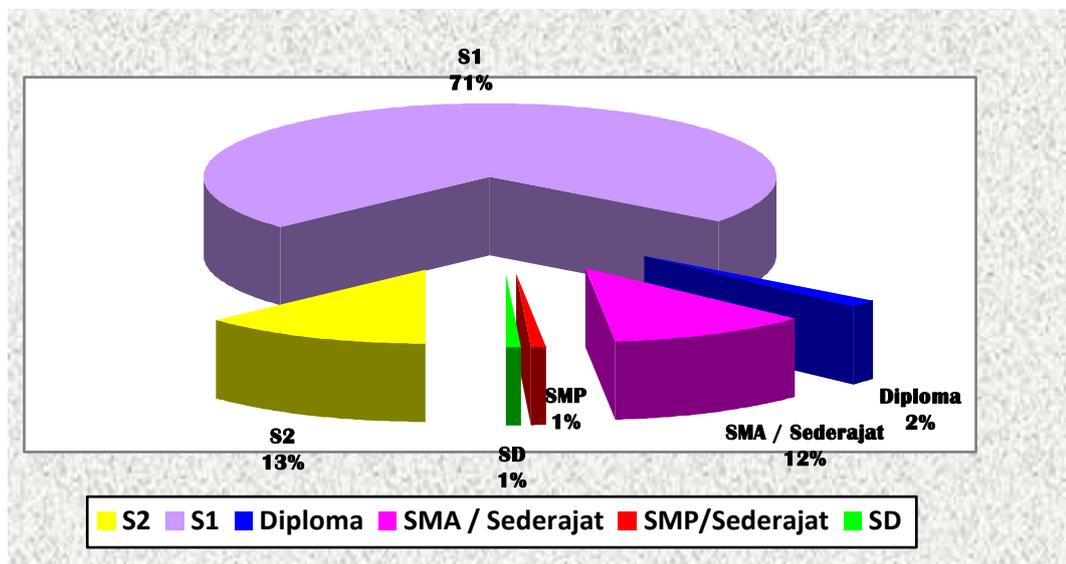
5. SLTA : 15 (lima belas) orang

6. SMP : 1 (satu) orang

7. SD : 1 (satu) orang

Secara lebih terperinci, hingga akhir tahun 2021, keadaan pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Bima dapat dilihat pada grafik dibawah berikut :

a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

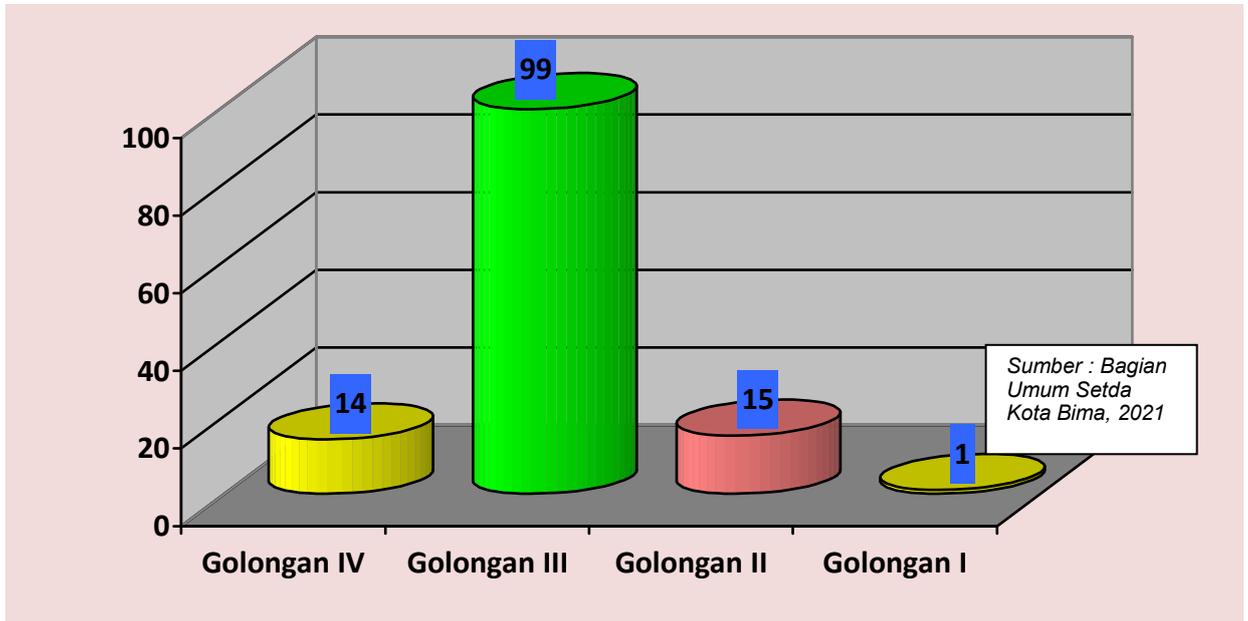


Grafik 1. 1 Jumlah Pegawai Sekretaris Daerah berdasarkan Pendidikan



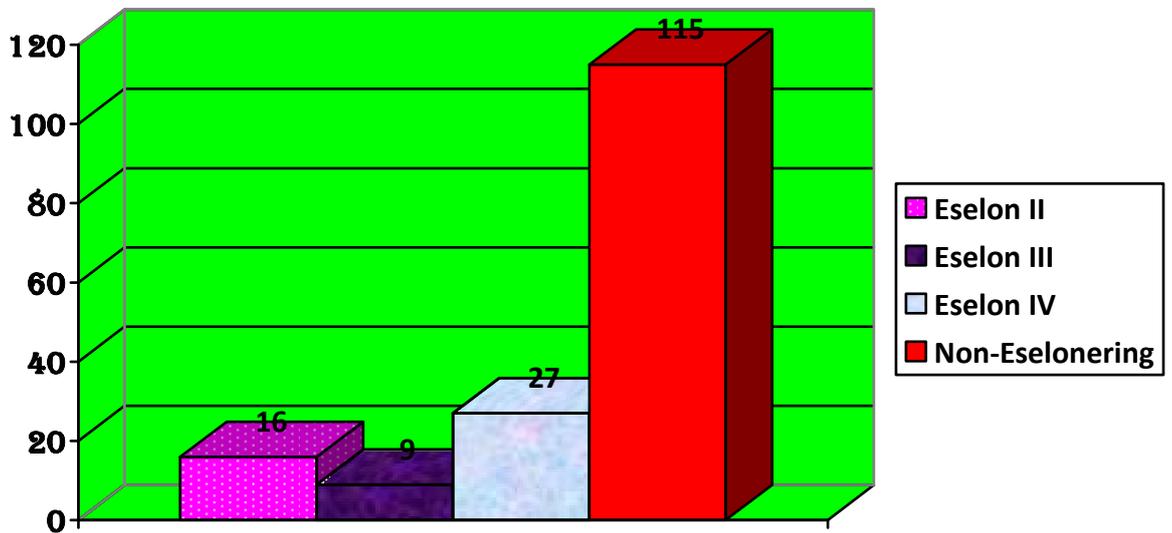
b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Sumber : Bagian Umum Setda Kota Bima, 2021



Grafik 1. 2 Jumlah pegawai berdasarkan golongan

c. Jumlah pegawai berdasarkan eselonering



Grafik 1. 3 Jumalaah Pegawai berdasarkan eselonering



1.4.2 Sumber Daya Aset/Modal

Kantor Sekretariat Daerah Kota Bima terletak di Jalan Soekarno-Hatta Raba, Kota Bima. Kebutuhan ruangan kerja masih belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu, ruang pertemuan yang memadai dan representatif untuk mendukung kelancaran operasional tugas Sekretariat Daerah pun belum tersedia.

Fasilitas perkantoran yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Bima sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Mebeleur, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
2. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan Internet, dan mesin faksimili;
3. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis perencanaan, dilengkapi dengan ketersediaan printer, plotter, dan server;
4. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital, GPS, mesin tik, dan LCD proyektor;
5. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti lemari es, air conditioner (AC), dispenser, kipas angin, dan televisi;
6. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.



1.5 Aspek Strategis

Bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila dimulai dengan perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (*Kekuatan dan Kelemahan*) serta Lingkungan Eksternal (*Peluang dan Tantangan*) suatu organisasi. Rencana Strategis meliputi penetapan *Visi, Misi, Tujuan, Sasaran* serta *Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran* yang berupa *Kebijakan, Program dan Kegiatan* dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Nilai yang terkandung dari pengertian serta karakteristik *good governance* tersebut merupakan nilai-nilai yang universal sifatnya dan sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Kondisi semacam ini diwajibkan bagi siapa saja yang terlibat dalam pembuatan keputusan, baik itu pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat untuk bertanggung jawab kepada publik.



1.6 Landasan Hukum

LKIP Sekretariat Daerah Kota Bima disusun berdasarkan landasan hukum, antara lain;

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 2 kali terakhir Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian



Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1.7 Permasalahan Yang Sedang Dihadapi

Sekretariat Daerah sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Peranan sekretariat yang begitu besar dan luas dilaksanakan oleh masing-masing sub bagian yang bertanggung jawab kepada kepala bagian, dan kepala bagian ini akan bertanggung jawab kepada asisten dan asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah langsung. Permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Bima, antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas dan intensitas koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Belum optimalnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan tugasnya.
3. Kurangnya keterlibatan sumber daya aparatur dalam pelatihan dan pendidikan sehingga kualitas yang ada saat ini belum mampu ditingkatkan sementara kebutuhan kualitas terus meningkat.
4. Kurangnya koordinasi dan penyelenggaraan kebijakan administrasi program dan pembangunan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategi Tahun 2018-2023

Rencana Strategis merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bima ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu yang dimulai dari Tahun 2018 sampai dengan 2023.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bima 2018-2023 dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Sekretariat Daerah Kota Bima, strategi pembangunan, kebijakan umum dan program / kegiatan bagian-bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bima. Adapun tujuan dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bima adalah :

1. Sebagai pedoman penyusunan Renja dan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bima antara tahun 2018-2023;
2. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bima antara tahun 2018-2023;
3. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bima dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;



4. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bima guna memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.

2.1.1 Visi

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang organisasi, tujuan - tujuan organisasi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, dikarenakan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut. Beberapa persyaratan yang hendaknya dipenuhi oleh suatu pernyataan visi:

- Berorientasi ke depan
- Tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini
- Mengekspresikan kreatifitas
- Berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat

Visi Sekretariat Daerah Kota Bima sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2018 – 2023 juga merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kota Bima periode 2018-2023 adalah **“Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang maju dan mandiri”**.



2.1.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban/dilaksanakan suatu organisasi sesuai visi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, maka misi merupakan suatu penjabaran tentang apa yang harus dilakukan agar visi yang telah disepakati dapat dicapai. Misi dapat dikatakan sebagai suatu koridor atau alat pengendali suatu organisasi dalam menetapkan kegiatan atau strategi operasionalnya, sehingga tidak menyimpang dari visi yang disepakati. Dalam mencapai visinya, Sekretariat Daerah Kota Bima telah menetapkan misi yang akan menjadi pegangan dalam mengembangkan dan merumuskan langkah selanjutnya.

Misi tersebut adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
2. Memantapkan koordinasi dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah
3. Meningkatkan kapasitas pelayanan aparatur

2.1.3 Tujuan Dan Sasaran Sekreariat Daerah

Dalam rangka penjabaran visi dan misi tersebut, maka setiap misi perlu ditetapkan tujuan dan sasaran serta indikator kerjanya sehingga pelaksanaan setiap misi akan terukur secara jelas pada setiap tahapan dan setiap waktu pelaksanaan. Adapun tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kota Bima adalah sebagaimana disajikan dalam tabel. 2.1. berikut ini.



Tabel 2. 1 Sasaran Sekreariat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator
1	2	3
1.	Meningkatnya Fasilitas Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti
2.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip
3.	Meningkatnya Fasilitas Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah	Nilai LPPD
4.	Meningkatnya pengaruh kebijakan pelayanan publik terhadap nilai IKM	Skor rata-rata IKM
5.	Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah
6.	Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu
7.	Meningkatnya akuntabilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang melakukan pengadaan barang dan jasa melalui ULP
8.	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	persentase kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan yang ditindaklanjuti
9.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekertariat Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah:

- a. Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;



- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
- e. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretariat Daerah Kota Bima memiliki 9 (Sepuluh) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama. Untuk pencapaian sejumlah Indikator tersebut tentu diperlukan sumber anggaran sebagai salah satu prasyarat keberhasilan suatu rencana. Oleh karenanya jumlah anggaran sangat menentukan keberhasilan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Pencapaian target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur keberhasilan organisasi dalam upaya mencapai misi dan visinya. Sedangkan target kinerja dalam tingkat kegiatan digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan.

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Perubahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3	
1.	Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	100
2.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip	72,00
3.	Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan	Nilai LPPD	3,210



No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3	
	pemerintahan umum Daerah		
4.	Meningkatnya pengaruh kebijakan pelayanan publik terhadap nilai IKM	Skor rata-rata IKM	85
5.	Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100
6.	Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu	100
7.	Meningkatnya akuntabilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang melakukan pengadaan barang dan jasa melalui ULP	100
8.	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	persentase kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan yang ditindaklanjuti	100
9.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekretariat Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	100



Tabel 2. 3 Program dan Anggaran Tahun 2021

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.411.269.466
2	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.610.274.328
3	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	37.298.853.440
	JUMLAH	68.320.397.234



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan Visi Sekretariat Daerah Kota Bima. Untuk memudahkan dalam menilai kinerja dilakukan atribusi penilaian menggunakan skala ordinal sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Jumlah Nilai	Kategori
(1)	(2)	(3)
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Bahwa pada Tahun 2021 bahwa jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 9 sasaran dimana semua sasaran masuk kategori berhasil sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2 .

Tabel 3. 2. Rekapitulasi Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Kategori	Sasaran	Persentase Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sangat Tinggi	8	88,89
2.	Tinggi	1	11,11
3.	Sedang	0	0
4.	Rendah	0	0



5.	Sangat Rendah	0	0
6.	Belum Rilis	0	0
Jumlah		9	100

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Bahwa pada Tahun 2021 bahwa jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 9 sasaran dimana semua sasaran masuk kategori berhasil sebagaimana tersaji pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3. Tingkat Pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran dari hasil capaian indikator kinerja Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Meningkatnya Fasilitas Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00%
2	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Nilai	72,00	Belum Rilis	
3	Meningkatnya Fasilitas Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,210	Belum Rilis	
4	Meningkatnya pengaruh kebijakan pelayanan publik terhadap nilai IKM	Skor rata-rata IKM	Nilai	85	83,42	98,14%
5	Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	100	100	100,00%



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	undangan					
6	Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan	Porsentase OPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu	%	100	89,00	89,00%
7	Meningkatnya akuntabilitas Layanan Pengadadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang melakukan pengadaan barang dan jasa melalui ULP	%	100	100	100,00%
8	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	porsentase kebijakan daerah bidang protokol dan komukasi pimpinan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00%
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekretariat Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	%	100	100	100,00%
Rata-Rata Capaian						

Kategori keberhasilan pencapaian Sasaran Sekretariat daerah sebagaimana tersaji dalam tabel 3.3 menunjukkan bahwa 9 sasaran Sekretariat daerah kategori berhasil.

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2021

Pengukuran Kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun



rincian dan analisi kinerja masing-masing Sasaran dan Indikator Sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota Bima

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2020			2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Nilai	70,01	Belum Rilis		72,00	Belum Rilis	
3	Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,200	Belum Rilis		3,210	Belum Rilis	
4	Meningkatnya pengaruh kebijakan pelayanan publik terhadap nilai IKM	Skor rata-rata IKM	Nilai	80	82,61	103,26%	85	83,42	98,14
5	Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	100	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan	Porsentase OPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu	%	100	88,89	88,89	100	89	89,00
7	Meningkatnya akuntabilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang melakukan pengadaan barang dan jasa melalui ULP	%	100	100	100	100	100	100



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2020			2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
8	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	persentase kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekretariat Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	%	100	100	100	100	100	100
TOTAL									

Dari Tabel 3. 4 untuk Tahun 2021 belum dapat diketahui Rata-rata Capaian Kinerja karena ada dua indikator kinerja Nilai LAKIP dan LPPD Belum Rilis. Secara garis besar sasaran strategis dikategorikan berhasil. Dari sembilan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Bima ada 1 (satu) sasaran yang melebihi target yaitu Meningkatnya pengaruh kebijakan pelayanan publik terhadap nilai IKM.

Adapun Analisis Keberhasilan untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

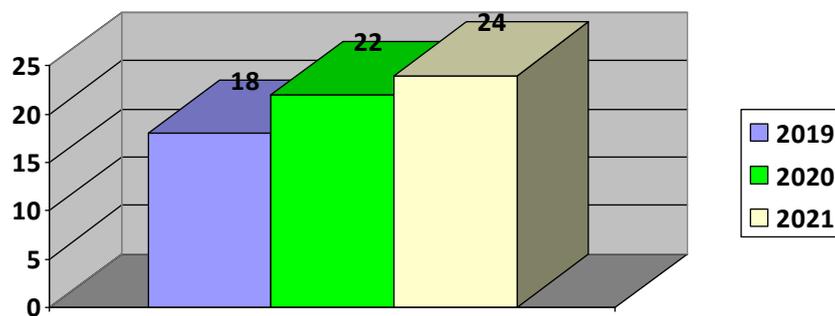
3.1.2.1. Sasaran I : Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah

Untuk Capaian sasaran Strategis 1 Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah dengan indikator Persentase



Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % atau masuk kategori sangat tinggi. Capaian dapat terwujud dengan terlaksananya semua kebijakan bidang perekonomian. Untuk lebih jelasnya jumlah kebijakan tahun 2019, 2020, dan 2021 dapat dilihat dalam grafik 3. 1.

Jumlah kebijakan bidang perkeonimian yang ditindaklanjuti

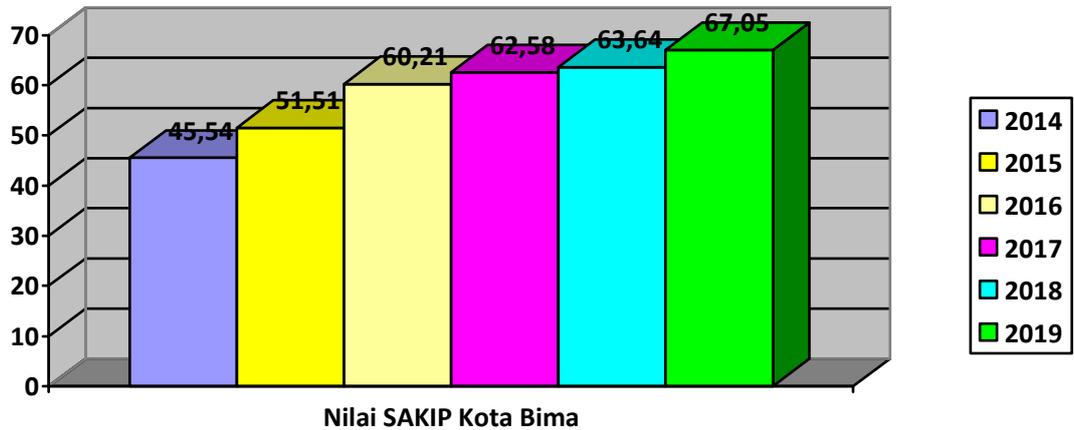


Grafik 3. 1 Grafik kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

3.1.2.2. Sasaran II : Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Untuk Capaian sasaran Strategis 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan indikator *Nilai Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* Kota Bima pada Tahun 2021 belum memperoleh hasil (belum rilis).

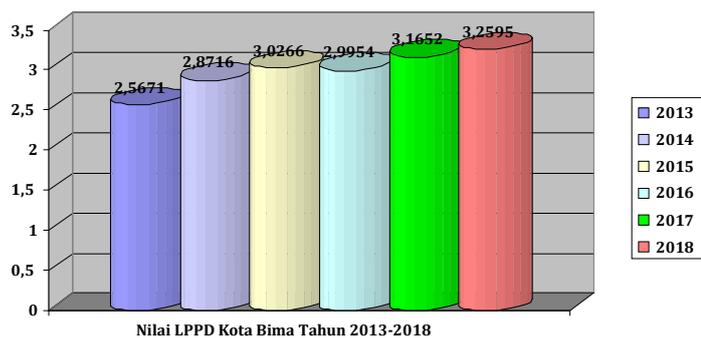
Adapun daftar rincian peningkatan nilai SAKIP selama 5 Tahun terakhir sebagaimana Grafik 3.1.



Grafik 3. 2 Nilai SAKIP Kota Bima

3.1.2.3. Sasaran III : Meningkatnya Fasilitas Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah

Untuk Capaian sasaran Strategis 3 Meningkatnya Fasilitas Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah dengan indikator Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah belum memperoleh hasil (belum rilis).



Grafik 3. 3. Nilai LPPD Kota Bima 2013-2018



3.1.2.4. Sasaran IV : Meningkatnya pengaruh kebijakan pelayanan publik terhadap nilai IKM

Untuk Capaian sasaran Strategis 4 Meningkatnya pengaruh kebijakan pelayanan publik terhadap nilai IKM dengan indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat* mendapatkan capaian kinerja sebesar 98,14% atau masuk kategori berhasil.

Capaian sasaran strategis Sekretariat Daerah yang ke 4 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Skor Rata-rata IKM dengan target Tahun 2021 sebesar 85 (kategori baik) memperoleh realisasi sebesar 83,42 (kategori Baik) dengan capaian kinerja perangkat Daerah sebesar 98,14. Hal ini sama dengan membandingkan target yang ada di RPJMD Pemerintah Kota Bima Tahun 2018-2023 untuk tahun 2021 dengan target Nilai IKM sebesar 85. Maka capaiannya sama yaitu 98,14%.

Dari Hasil survei terhadap Kepuasan masyarakat terhadap unit Layanan Publik lingkup Pemerintah Kota Bima diperoleh nilai indeks survei 83,42 atau kategori baik lebih meningkat dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya yaitu dengan nilai indeks 82,61. Hal ini disebabkan oleh upaya pembinaan terhadap unit layanan terutama dalam pemenuhan standar layanan publik yang baik, walaupun dari aspek sarana dan prasarana masih belum sepenuhnya dapat ditingkatkan.

3.1.2.5. Sasaran V : Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

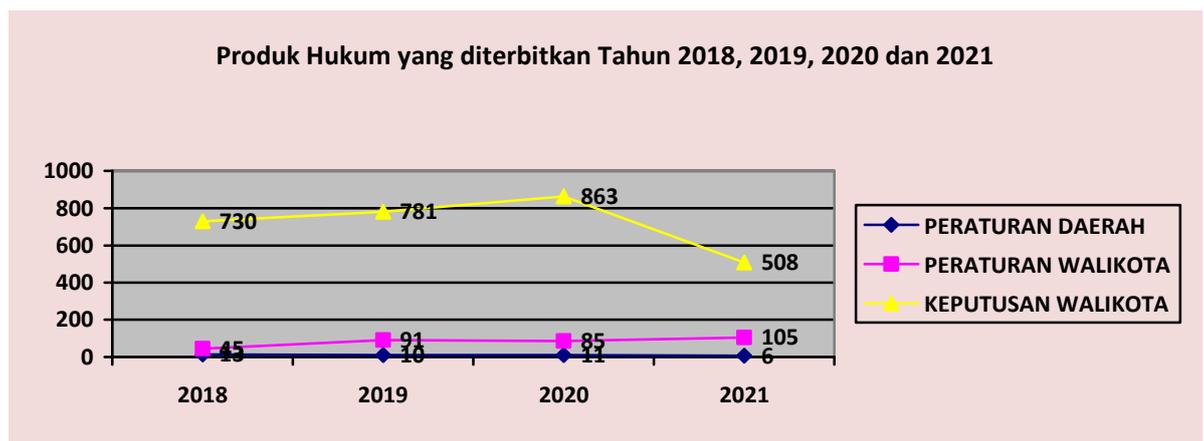


Untuk Capaian sasaran Strategis 5 Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan indikator *Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah* mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % atau masuk kategori berhasil.

Bahwa Pemerintah Kota *Bima* pada Tahun 2021 menargetkan rancangan Peraturan Daerah yang disahkan sebanyak 10 Perda dengan tingkat realisasi sebanyak 6 Perda. Realisasi capaian Produk Hukum yang diterbitkan dapat dilihat pada Tabel

Tabel 3. 5 Produk hukum yang diterbitkan

TAHUN	PERATURAN DAERAH	PERATURAN WALIKOTA	KEPUTUSAN WALIKOTA
1	2	3	4
2018	13	45	730
2019	10	91	781
2020	11	85	863
2021	6	105	508



Grafik 3. 4 Produk Hukum Daerah yang di terbitkan



3.1.2.6. Sasaran VI: Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan

Untuk capaian sasaran strategis 6 Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan dengan indikator *Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu* mendapatkan capaian kinerja sebesar 89,00 %. Capaian ini belum mencapai target yang diharapkan karena terkendala beberapa Perangkat daerah belum bisa menyampaikan laporan secara utuh karena ada beberapa pihak ketiga yang belum menyampaikan hasil pembangunannya.

3.1.2.7. Sasaran VII : Meningkatnya akuntabilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Untuk capaian Sasaran Strategis Sekretaris Daerah yang ke 8 yaitu Meningkatnya akuntabilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan Indikator *Persentase Persentase pengadaan barang dan jasa secara online* memperoleh capaian kinerja sebesar 100%.

Pencapaian ini bisa diwujudkan karena mulai tahun 2019 semua pengadaan barang dan jasa baik yang dilakukan dengan tender maupun non tender semua dilakukan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) sedangkan pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 sebelumnya hanya pengadaan dengan tender yang dilakukan dengan online. Sebagai pembandingan dapat dilihat pada Tabel 3.5.



Tabel 3. 6 Pengadaan Barang dan Jasa 2017-2021

TAHUN	Pengadaan Online	Pengadaan non online
1	2	3
2017	109	785
2018	71	721
2019	775	
2020	57	
2021	108	

3.1.2.8. Sasaran VIII : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekretariat Daerah

Untuk Capaian sasaran Strategis ke 8 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekretariat Daerah dengan indikator Persentase Sarana dan Prasaran dalam kondisi baik mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % atau masuk kategori Sangat Tinggi.

3.1.2.9. Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan

Untuk Capaian sasaran Strategis ke 9 Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan dengan indikator persentase kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan yang ditindaklanjuti mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % atau masuk kategori Sangat Tinggi.



3.1.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.3.1. Anggaran

Untuk mencapai target Sembilan indikator yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah Kota Bima menganggarkan belanja langsung tahun 2021 sebesar Rp 68.320.397.234. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 67.066.968.352 atau 98,17 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Bima telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.253.428.882 atau 1,83 %.

3.1.3.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kinerja, Sekretariat Daerah Kota Bima didukung dengan sarana dan prasarana berupa kendaraan operasional roda empat dan roda dua, peralatan kantor dan perlengkapan kantor. Selain itu perkembangan teknologi informasi yang pesat dimanfaatkan dengan membuat sistem informasi yang dapat mempermudah dalam pelaksanaan pekerjaan.

3.2 REALISASI KEUANGAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jumlah anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk melaksanakan program/kegiatan yang diperjanjikan sebesar Rp. 68.320.397.234. (*Enam Puluh*



Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Sembiliah Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 67.066.968.352 (*Enam Puluh Tujuh Milyar Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*). Sehingga bila dihitung capaiannya sebesar 98,17 %.

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2021

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.411.269.466	28.395.680.904	96,55
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.822.000	12.822.000	100,00
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.522.133.376	13.248.570.220	97,98
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.224.600	13.168.600	99,58
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.510.962.025	1.510.898.970	100,00
e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.691.476.400	1.538.870.000	90,98
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.343.369.680	3.142.591.664	93,99
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.081.337.400	2.061.790.830	99,06
h.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.182.398.035	832.752.744	70,43
i.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.965.714.900	1.963.465.656	99,89
j.	Penataan Organisasi	450.220.500	437.077.270	97,08
k.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.637.610.550	3.633.672.950	99,89
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	37.298.853.440	37.088.839.927	99,44
a.	Administrasi Tata Pemerintahan	26.055.527.790	25.928.671.786	99,51



NO.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	
	b.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10.700.397.650	10.622.028.201	99,27
	c.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	542.928.000	538.139.940	99,12
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan		1.610.274.328	1.582.447.520	98,27
	a.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	365.154.000	354.412.100	97,06
	b.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	530.720.784	520.158.500	98,01
	c.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	597.290.074	590.831.950	98,92
	d.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	117.109.470	117.044.970	99,94
Total		68.320.397.234	67.066.968.351	98,17	



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagai Penutup dari laporan kinerja Sekretariat daerah Kota Bima tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kota Bima telah memperlihatkan pencapaian Kinerja yang Signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil Analisis pencapaian indikator sekretariat Daerah sangat tinggi, terdiri dari persentase capaian tertinggi ada pada sasaran strategis ke-4, yaitu Meningkatnya pengaruh kebijakan pelayanan publik terhadap nilai IKM sebesar 103,26% dan persentase capaian terendah adalah sasaran ke- 6, yaitu kepatuhan OPD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan sebesar 89,00 %.

Realisasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 67.066.968.352 dari total anggaran sebesar Rp. 68.320.397.234 sehingga Sekretariat Daerah Kota Bima melakukan efisiensi anggaran sebesar 1.253.428.882 atau 1,83 %.

4.2 Saran

Walaupun rata-rata capaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Bima termasuk kategori berhasil namun masih ada satu sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Bima yang belum memenuhi target yaitu sasaran ke-6, yaitu Meningkatnya Pelaksanaan pembangunan Sesuai aturan sebesar 89,00%. Maka langkah untuk meningkatkan perlu dilakukan langkah-langkah pendampingan untuk mempercepat penyusunan laporan Pembangunan.